

**PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
TERHADAP PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN KARET
PADA PT BPR KOTO VII KECAMATAN KOTO VII
KABUPATEN SIJUNJUNG**



OLEH

DESSI WIDYA HARTI
03914018



**JURUSAN SOSIAL EKONOMI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
TERHADAP PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN KARET
PADA PT BPR KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG**

OLEH

DESSI WIDYA HARTI
03914018

SKRIPSI
*Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian*

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
TERHADAP PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN KARET
PADA PT BPR KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Peranan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Perkebunan dan Perdagangan Karet pada PT. BPR Koto VII Kabupaten Sijunjung" ini telah dilaksanakan selama tiga bulan, mulai bulan April sampai Juni 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran dan pengembalian kredit perkebunan dan perdagangan karet pada PT BPR Koto VII serta menganalisis pemanfaatan dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan usahatani dan perdagangan karet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yang dilakukan pada nasabah kredit BPR Koto VII yang baru mengambil kredit pada tahun 2006 dan telah melakukan pembayaran angsuran kredit minimal 12 kali angsuran yang terdiri dari 14 nasabah kredit perkebunan karet dan 4 orang nasabah kredit perdagangan karet. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian mengenai pengaruh kredit terhadap tingkat pendapatan usahatani dan perdagangan karet akan diuji secara statistik dengan menggunakan "Uji t".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran dan pengembalian kredit perkebunan dan perdagangan karet pada PT BPR Koto VII masih kurang sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh PT BPR Koto VII, terutama dalam pemberlakuan sanksi untuk keterlambatan pengembalian kredit oleh nasabah dan penyuluhan tentang kredit oleh pihak Bank. Sampai tahun 2007 jumlah kredit yang disalurkan PT BPR Koto VII terhadap perkebunan karet adalah sebesar 33,34% dan perdagangan karet sebesar 21,06% dari total keseluruhan jumlah kredit yang disalurkan. Dari sisi pengembalian kredit, terjadi pengembalian kredit yang kurang lancar oleh 60,71% nasabah sampel. Kemudian dalam pemanfaatan kredit, masih ada sebanyak 92,86% nasabah sampel kredit perkebunan karet yang melakukan penyimpangan penggunaan kredit dimana dana kredit yang ada hanya digunakan sebesar 47,09% untuk pembiayaan usahatani karet, dan sisanya digunakan untuk keperluan lain. Kemudian dari hasil analisa statistik dengan menggunakan "uji t" mengenai pengaruh kredit terhadap tingkat pendapatan usahatani dan perdagangan karet diperoleh bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan antara sebelum dan setelah memanfaatkan kredit, dimana pendapatan petani sampel meningkat sebesar 53,21% dan pendapatan pedagang sampel meningkat sebesar 93,16%.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum PT BPR Koto VII masih berperanan sangat kecil terhadap perkebunan dan perdagangan karet di wilayah kerjanya, yang dilihat dari masih kecilnya persentase kredit yang disalurkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada PT BPR Koto VII agar lebih besar perhatiannya terhadap perkebunan dan perdagangan karet karena sebagian besar penduduk di wilayah kerjanya mempunyai mata pencaharian di bidang karet. Selain itu, dalam penyaluran kredit sebaiknya PT BPR Koto VII melakukan analisa dan pengawasan yang lebih mendalam untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemanfaatan kredit oleh nasabah yang akhirnya berujung pada kemacetan pengembalian kredit.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia adalah sumberdayanya yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini (58,73%), dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan (Departemen Pertanian, 2005).

Pertanian mempunyai arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan di masa mendatang. Sektor pertanian tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi penduduk, tetapi juga sumber penghidupan bagi 50% penduduk. Selain itu, pertanian juga merupakan sumber pendapatan ekspor (devisa) serta pendorong dan penarik bagi tumbuhnya sektor-sektor lain (Nainggolan, 2005).

Karet alam merupakan salah satu komoditi perkebunan yang merupakan bagian dari subsektor pertanian dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet dan sumberdaya hayati (Balai Penelitian dan Pengembangan Sumatera Barat, 2005).

Indonesia merupakan negara dengan perkebunan karet terluas di dunia, meskipun tanaman tersebut baru terintroduksi pada tahun 1864. Hanya dalam kurun waktu sekitar 150 tahun sejak dikembangkan pertama kali, luas areal perkebunan karet di Indonesia telah mencapai 3.262.291 Ha (Setiawan dan Andoko, 2005).

Di Sumatera Barat, karet merupakan komoditi utama setelah kelapa sawit. Hal ini terlihat dari luasnya areal tanam perkebunan karet yang menduduki peringkat kedua setelah kelapa sawit sebagai komoditi dengan areal tanam terluas di propinsi ini (Lampiran 1). Potensi perkebunan karet di Sumatera Barat berasal dari perkebunan rakyat, karena 85% dari luas areal perkebunan karet merupakan

perkebunan karet milik rakyat, dan hanya 7% perkebunan besar negara, serta 8% perkebunan besar milik swasta (Dinas Perkebunan, 2006).

Salah satu kegiatan pokok pembangunan pertanian khusus perkebunan pada Program Pengembangan Agribisnis (PPA) adalah dalam hal permodalan (Suryadi *cit* Suseno, 2007). Adanya lembaga keuangan lokal merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung percepatan pengembangan agribisnis di pedesaan. Salah satu bentuk lembaga keuangan lokal di Indonesia yang telah memiliki akar dalam sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR merupakan salah satu jenis lembaga keuangan atau bank yang ada di daerah pedesaan dan pemberi pelayanan kredit kepada masyarakat desa yang mempunyai kegiatan di tingkat kecamatan (Sumitro, 1996). Dalam struktur industri perbankan nasional, BPR adalah salah satu kelompok bank yang memegang peranan amat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya di bidang pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (Makatutu, 2006).

Lembaga keuangan lokal yang telah banyak berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terutama di tingkat nagari Sumatera Barat selama ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jumlah BPR di Sumatera Barat telah berkembang dari 110 kantor pada tahun 2001 menjadi 131 kantor pada tahun 2005 (Bank Indonesia *cit* Direktorat Pengawasan BPR, 2006).

PT BPR Koto VII sebagai salah satu lembaga kredit pedesaan di Kabupaten Sijunjung yang mulai beroperasi berdasarkan Surat Izin Operasional Kep-529/Km.17/1997 tertanggal 10 Oktober 1997, turut berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya dengan menyalurkan bantuan kredit bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif sebagai salah satu bentuk penyaluran/penyediaan modal dengan bunga yang terjangkau.

Secara umum tujuan didirikannya PT BPR Koto VII: (1) memasarkan produk-produk perbankan dan memobilisasi dana masyarakat melalui tabungan, deposito serta pembiayaan (kredit) bagi masyarakat di sekitar wilayah kerjanya, dan (2) menunjang perekonomian daerah dengan menyalurkan kredit bagi kegiatan usaha yang bersifat produktif. Dalam menjalankan usahanya PT BPR Koto VII mempunyai misi "Untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai suatu Bank yang sehat dan handal di daerah pedesaan untuk ikut serta menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, antara lain

melalui pemberian kredit bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat kecil terutama yang bersifat produktif" (PT BPR Koto VII Kab. Sijunjung).

1.2. Perumusan Masalah

Kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang memiliki areal terluas untuk tanaman karet setelah Kabupaten Dharmasraya yaitu seluas 36.599 Ha (Lampiran 2). Selain itu, Kabupaten ini juga merupakan salah satu daerah sentra produksi perkebunan karet rakyat di Sumatera Barat (Lampiran 3). Komoditi karet selama tahun 2006 produksinya mencapai 61.367 ton. Dibandingkan dengan kelapa sawit produksi karet nampaknya masih dominan, dimana produksi kelapa sawit pada tahun 2006 baru mencapai 50.862,5 ton (Lampiran 4). Bergairahnya harga komoditi karet pada tahun 2006, tampaknya telah merangsang para petani untuk menanam karet. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan luas tanam karet yang mencapai 37.090 Ha (Lampiran 5).

Kecamatan Koto VII, Kecamatan Kupitan dan Kecamatan Sumpur Kudus merupakan tiga kecamatan di Kabupaten Sijunjung yang berpotensi untuk pengembangan perkebunan karet rakyat. Potensi perkebunan karet rakyat di tiga kecamatan ini dapat dilihat dari luasnya lahan perkebunan karet yang diusahakan oleh penduduk di masing-masing kecamatan. Sampai tahun 2006, luas lahan yang diusahakan untuk tanaman perkebunan karet di Kecamatan Koto VII adalah seluas 5.370 Ha, di Kecamatan Kupitan seluas 2.003 Ha, kemudian di Kecamatan Sumpur Kudus, luas lahan yang diusahakan untuk tanaman perkebunan karet adalah seluas 4.025 Ha (Lampiran 6).

Dilihat dari potensi yang dimiliki tiga kecamatan ini untuk perkebunan karet, maka memungkinkan untuk dilakukan pengembangan agribisnis karet di daerah ini. Untuk membangun daerah agribisnis karet yang memiliki daya saing diperlukan sumber modal yang kuat bagi petani dan para pelaku usaha mikro pelaksananya. Permasalahan permodalan ternyata menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro di daerah ini.

Melihat dari situasi inilah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-039/MK.17/1997 mengenai persetujuan prinsip untuk mendirikan BPR dan sesuai dengan surat pertimbangan Bank Indonesia No. 36/62/Dir/UBPR/Rahasia/1997, mendirikan PT BPR Koto VII di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Pendirian PT BPR Koto VII

diharapkan dapat mewujudkan upaya pengembangan usaha kecil produktif melalui pemberian kredit bagi usaha-usaha kecil di pedesaan. Bantuan kredit yang diberikan oleh PT BPR Koto VII diharapkan dapat membantu penambahan modal bagi petani/masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka.

PT BPR Koto VII telah menyalurkan kredit untuk perkebunan dan perdagangan karet sejak tahun awal berdirinya yaitu pada tahun 1997. Dari tahun awal berdirinya sampai pada tahun 2007 jumlah kredit yang disalurkan oleh PT BPR Koto VII adalah sebesar Rp 7.442.462.000, dimana jumlah kredit untuk perkebunan dan perdagangan karet masing-masingnya adalah sebesar Rp 2.481.529.000 dan Rp 1.567.156.000 (Lampiran 7). Selama periode tiga tahun terakhir (2005-2007), jumlah kredit yang disalurkan untuk perkebunan dan perdagangan karet mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2005 jumlah kredit yang disalurkan untuk perkebunan karet adalah sebesar Rp1.731.479.000 dan meningkat menjadi Rp2.481.529.000 pada tahun 2007 atau meningkat sebesar 43,32%. Sedangkan untuk kredit perdagangan karet peningkatan jumlah kredit yang disalurkan adalah sebesar 201,69% dimana pada tahun 2005 jumlah kredit yang disalurkan adalah sebesar Rp519.444.000 dan menjadi Rp1.567.156.000 pada tahun 2007 (Lampiran 8).

Dari perumusan masalah diatas, menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi penyaluran dan pengembalian kredit perkebunan dan perdagangan karet pada PT BPR Koto VII.
2. Bagaimana pemanfaatan dan pengaruh kredit perkebunan dan perdagangan karet terhadap tingkat pendapatan usahatani karet dan perdagangan karet.

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang seberapa jauh peranan PT BPR Koto VII terhadap perkebunan dan perdagangan karet, dengan judul penelitian "*Peranan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Perkebunan dan Perdagangan Karet Pada PT BPR Koto VII Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung*".

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari permasalahan yang ada adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi penyaluran dan pengembalian kredit perkebunan dan perdagangan karet pada PT BPR Koto VII.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kerja PT BPR Koto VII

Wilayah kerja PT BPR Koto VII terdiri dari Kecamatan Koto VII, Kecamatan Kupitan dan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Secara geografis, Kecamatan Koto VII terletak pada $00^{\circ}33'13'' - 00^{\circ}40'39''$ LS dan $100^{\circ}48'1'' - 100^{\circ}58'16''$ BT dengan luas wilayah sekitar $143,90 \text{ km}^2$. Kecamatan Koto VII merupakan kecamatan ketiga terkecil di Kabupaten Sijunjung, atau sekitar 4,60 persen dari luas Kabupaten Sijunjung.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2005), jumlah penduduk Kecamatan Koto VII pada tahun 2005 tercatat sebanyak 29.140 jiwa dengan rincian 14.536 orang laki-laki dan sebanyak 14.604 orang perempuan. Dimana sektor pertanian merupakan lapangan usaha terbanyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 10.673 jiwa. Selengkapnya mengenai jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2005 di Kecamatan Koto VII dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Banyaknya Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Koto VII Tahun 2005

No	Lapangan Perkerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki (org)	Perempuan (org)	
1.	Pertanian	5.832	4.841	10.673
	a. Tanaman Pangan	5.012	4.265	9.277
	b. Perkebunan	542	306	848
	c. Perikanan	27	5	32
	d. Peternakan	120	76	196
	e. Pertanian Lainnya	131	189	320
2.	Industri Pengolahan	221	247	468
3.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	619	718	1.377
4.	Jasa-Jasa	849	440	1.289
5.	Transportasi dan Komunikasi	299	10	309
6.	Lainnya	286	329	615
	Jumlah	8.106	6.585	14.691

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005

Kemudian dari data Badan Pusat Statistik (2006) tercatat bahwa penggunaan lahan di Kecamatan Koto VII untuk perkebunan adalah seluas 5.649 Ha. Komposisi penggunaan lahan untuk perkebunan di Kecamatan Koto VII, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Penggunaan Lahan Perkebunan di Kecamatan Koto VII

No.	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1.	Karet	5.336	94,45
2.	Kopi	90	1,59
3.	Kelapa	129	2,28
4.	Cengkeh	0,5	0,01
5.	Cassia vera	28	0,49
6.	Tebu	2	0,03
7.	Pinang	14	0,24
8.	Gardamunggu	1,5	0,02
9.	Coklat	45	0,79
10.	Kemiri	3	0,05
Jumlah		5.649	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2006

Dari Tabel 3, terlihat bahwa penggunaan lahan perkebunan didominasi oleh perkebunan karet seluas 5.336 Ha atau sekitar 94,45% dari total luas lahan untuk perkebunan di Kecamatan Koto VII. Tanaman cengkeh merupakan tanaman yang paling sedikit diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Koto VII, hal ini terlihat dari luas lahan yang digunakan untuk tanaman cengkeh yaitu hanya seluas 0,5 Ha atau sekitar 0,008% dari total luas lahan perkebunan di Kecamatan ini.

Kecamatan Kupitan merupakan kecamatan yang berada pada ketinggian 223 meter di atas permukaan laut. Luas Kecamatan Kupitan hanya sekitar 81,61 km² dan merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Sijunjung. Secara geografis, Kecamatan Kupitan terletak pada 100°37'40" - 100°42'52" BT dan 00°39'21" - 00°47'22" LS. Kemudian mengenai jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2005 di Kecamatan Kupitan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Banyaknya Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Kupitan Tahun 2005

No	Lapangan Perkerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki (org)	Petempuan (org)	
1.	Pertanian	1.700	1.389	3.089
	a. Tanaman Pangan	1.389	1.115	2.504
	b. Perkebunan	75	21	96
	c. Perikanan	6	0	6
	d. Peternakan	58	25	83
	e. Pertanian Lainnya	172	228	400
2.	Industri Pengolahan	115	51	166
3.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	229	269	498
4.	Jasa-Jasa	394	329	723
5.	Transportasi dan Komunikasi	122	5	127
6.	Lainnya	338	289	627
Jumlah		2.898	2.332	5.230

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Bank Perkreditan (BPR) Terhadap Perkebunan dan Perdagangan Karet Pada PT BPR Koto VII, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sampai tahun 2007 jumlah kredit yang disalurkan PT BPR Koto VII terhadap perkebunan dan perdagangan karet adalah sebesar Rp 4.048.685.000 atau sebesar 54,36% (33,34% untuk perkebunan karet dan 21,06% untuk perdagangan karet) dari total keseluruhan jumlah kredit yang disalurkan. Jika dilihat dari persentase ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa PT BPR Koto VII masih berperanan sangat kecil terhadap perkebunan dan perdagangan karet di wilayah kerjanya mengingat sebagian besar penduduk di wilayah kerja BPR mempunyai mata pencaharian di bidang karet. Dari sisi pengembalian kredit, terjadi pengembalian kredit yang kurang lancar oleh 60,71% nasabah sampel yang disebabkan karena adanya penyimpangan penggunaan kredit dan kegagalan usaha nasabah.
2. a. Dalam penggunaan dana kredit, sebanyak 92,86% nasabah sampel kredit perkebunan karet yang melakukan penyimpangan penggunaan kredit dimana dana kredit yang ada hanya digunakan sebesar 47,09% untuk pembiayaan usahatani karet, dan sisanya digunakan untuk keperluan lain. Sedangkan untuk kredit perdagangan karet, tidak terjadi penyimpangan penggunaan kredit oleh nasabah sampel dimana kredit yang ada digunakan 100% untuk biaya usaha perdagangan karet.
b. Penggunaan kredit perkebunan dan perdagangan karet oleh nasabah sampel berpengaruh terhadap tingkat pendapatan usahatani karet dan perdagangan karet. Dimana setelah menggunakan kredit, pendapatan petani sampel meningkat sebesar 53,21% dan pendapatan pedagang sampel meningkat sebesar 93,16%.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan peranan BPR terhadap perkebunan dan perdagangan karet di pedesaan, diharapkan PT BPR Koto VII dapat memperluas jangkauannya baik dalam peningkatan jumlah nasabah kredit maupun jumlah pinjamannya sehingga BPR benar-benar berperan sebagai lembaga keuangan pedesaan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Dalam menyalurkan kredit perkebunan dan perdagangan karet sebaiknya PT BPR Koto VII melaksanakan analisa dan pengawasan yang lebih mendalam untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemanfaatan kredit oleh nasabah, sehingga tujuan pemberian kredit tersebut dapat tercapai yaitu membantu meningkatkan perekonomian nasabah.
3. Disarankan kepada petani karet agar lebih bisa mengakses dan memanfaatkan kredit perkebunan karet untuk pembiayaan usahatani karetnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, Widia. 2005. *Analisa Implementasi Program KUPEM di Kabupaten Kerinci*. [Tesis]. Padang. Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Arikunto, Suharsini. 1989. *Penilaian Program Pendidikan*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Analisa Kebijakan Pertanian Vol. 4 No. 2 Juni 2006, Hal. 146-164. Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. <http://google.com> [8 Oktober 2007].
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 2004*. Sawahlunto/Sijunjung.
- _____. 2005. *Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 2005*. Sawahlunto/Sijunjung.
- _____. 2006a. *Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 2006*. Sawahlunto/Sijunjung.
- _____. 2006b. *Sumatera Barat Dalam Angka 2006*. Padang.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Sumatera Barat. 2005. *Peranan Karet Alam Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Daerah*. Padang.
- Bank Indonesia. 1997. *Informasi Kredit Usaha Kecil*. Bina Usaha. Jakarta.
- _____. 1998. *Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992*. Sinar Grafiki. Jakarta.
- Basri, Hasan. 2000. *Perbandingan Tingkat Kesehatan BPR Konvensional dengan BPR Syariah: Studi Kasus di PT BPR Sungai Puar dan PT BPRS Carana Kiat Andalas di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Departemen Pertanian. 2005. *Revitalisasi Pertanian Sebagai Salah Satu Strategi Utama Pembangunan Nasional*. <http://www.deptan.go.id>. [28 Juli 2007].
- Desi, Nila Surya. 2006. *Analisa Usahatani dan Pemasaran Bengkuang*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat. 2006. *Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat*. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat. <http://www.bi.go.id>. [28 Juli 2007].
- Dinas Perkebunan. 2004. *Statistik Perkebunan Sumatera Barat 2004*. Padang.